

KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS

Rio Refki Maulana¹, Muthiyah Irmaliya Yasmin², Meutia Faiza Ammara³, Eko Ribawati⁴

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No.25
Serang Banten

Email : 2288230066@untirta.ac.id

Abstract: *This research aims to determine the practice of appanage and bekel against economic inequality and resistance in Java. This research also identifies the socio-economic factors behind anditism in Java, and also understands the relationship between the basic attitudes of Javanese cultural banditry and poverty and crime. This research tries to comprehensively describe the relationship between poverty and criminality in Java from the aspects of appanage, armor, banditry, economic background and basic attitudes of banditry.*

Keywords: *Poverty, Crime, Appanage, Bekel, Banditism, Social, Economic.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik apanage dan bekel terhadap kesenjangan ekonomi dan perlawanan di Jawa. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi anditisme di Jawa, memahami pula keterkaitan sikap dasar perbanditan budaya Jawa dengan kemiskinan dan kriminalitas. Penelitian ini mencoba menggambarkan komprehensif hubungan kemiskinan dan keiminalitas di Jawa dari aspek apanage, bekel, banditisme, latar belakang sisoal ekonomi dan sikap dasar perbanditan.

Keywords: Kemiskinan, Kriminalitas, Apanage, Bekel, Banditisme, Sosial, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kriminalitas merupakan dua fenomena sosial yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran setan yang kompleks. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan antara keduanya, namun konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat tertentu seringkali kurang diperhatikan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi keterkaitan antara kemiskinan, kriminalitas, dan faktor-faktor sosial-budaya pada masyarakat Jawa pada masa kolonial.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa praktik apanage dan bekel, sistem pemberian tanah oleh pemerintah kolonial Belanda kepada para bangsawan Jawa, telah menyebabkan terjadinya eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat jelata (Latif, 2012; Suseno, 2018). Namun, dampak dari praktik ini terhadap kemiskinan dan kriminalitas di Jawa masih belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, latar belakang sosial-ekonomi masyarakat Jawa yang hidup dalam kondisi miskin dan terbatasnya akses terhadap sumber daya (Geertz, 2013) juga menjadi faktor pendorong munculnya gerakan perlawanan, termasuk banditisme atau perbanditan.

Salah satu aspek penting yang belum banyak dieksplorasi adalah sikap dasar perbanditan dalam budaya Jawa dan kaitannya dengan kemiskinan dan kriminalitas. Sikap ini mencerminkan semangat perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, serta keinginan untuk mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia (Kartodirdjo, 2014). Namun, bagaimana sikap ini berperan dalam mendorong tindakan kriminal dan perlawanan terhadap penguasa kolonial masih perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini akan menjawab tiga rumusan masalah utama: Bagaimana praktik apanage dan bekel memicu kemiskinan dan kriminalitas di Jawa? Apa latar belakang sosial-ekonomi yang mendorong munculnya

banditisme (bandit-bandit) di Jawa? Bagaimana sikap dasar perbanditan dalam budaya Jawa berkaitan dengan kemiskinan dan kriminalitas?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar masalah kemiskinan dan kriminalitas di Jawa dari perspektif sejarah dan budaya. Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kriminalitas dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya khazanah pengetahuan tentang sejarah dan budaya Jawa, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena kemiskinan dan kriminalitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian sejarah dengan tujuan untuk mengetahui praktik apanage dan bekel terhadap kesenjangan ekonomi dan perlawanan di Jawa. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi anditisme di Jawa, memahami pula keterkaitan sikap dasar perbanditan budaya Jawa dengan kemiskinan dan kriminalitas. Penelitian ini mencoba menggambarkan komprehensif hubungan kemiskinan dan keiminalitas di Jawa dari aspek apanage, bekel, banditisme, latar belakang sisoal ekonomi dan sikap dasar perbanditan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui lima tahapan yakni memilih topik, mengumpulkan sumber (heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi). Penulisan ini menggunakan sumber pustaka seperti makalah, jurnal, arsip dan website surat kabar yang menggambarkan komprehensif hubungan kemiskinan dan keiminalitas di Jawa dari aspek apanage, bekel, banditisme, latar belakang sisoal ekonomi dan sikap dasar perbanditan.

Data yang diperoleh dikritik secara interen dan ekstern. Pada analisis proses, data diklasifikasi berdasarkan kronologis dengan tujuan untuk menguraikan kemiskinan dan kriminalitas di Jawa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen sejarah, laporan kolonial, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Temuan penelitian akan dibahas secara kritis dan diinterpretasikan dalam konteks teori dan konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam masyarakat tradisional, bekel menguasai seluruh tenaga kerja yang ada di tanah apanage. Akan tetapi setelah tanah tersebut disewa oleh perusahaan perkebunan, hak-hak yang ada pada patuh beralih kepada perusahaan perkebunan. Dengan adanya perubahan pemegang tanah apanage ini, berubah pula peran bekel itu sendiri. Selama abad ke-19 tersebut tampak sekali perubahan peran bekel yang secara berlahan bergerak dari aktivitas ekonomi menuju politik.

Sistem ini adalah kendala besar bagi proses industrialisasi dan komersialisasi pemerintah kolonial. Dalam sistem apanage ini masih berlaku berbagai macam kerja wajib yang terikat secara organik dalam ikatan feodal. Tentunya model seperti ini adalah hambatan dalam proses modernisasi. Oleh karena itu pemerintah kolonial ingin mengubah kerja wajib menjadi kerja upah yang membebaskan petani dari ikatan kerja tradisional. Para petani berhak memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dengan imbalan upah. Cara lain untuk menghapus hambatan tersebut, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi (perombakan), yaitu dengan menata kembali kedudukan tanah desa dan membentuk administrasi merintahan desa. Dalam usaha penataan tersebut, penghapusan apanage mau tidak mau harus dilakukan. Karena dengan adanya perubahan status apanage dari wewenang anggaduh (hak mengerjakan) menjadi wewenag pandarbe (hak milik) akan memudahkan pelaksanaan kontrak tanah.

Perbanditan sosial pertama kali diperkenalkan oleh Hobsbawm. Seorang sejarawan Inggris, yang menyebut bahwa perbanditan dilakukan oleh sekelompok orang

marginal dari masyarakat petani kegiatan mereka dianggap kriminal oleh penguasa. Hubungan petan bandit menciptakan perbanditan sosial.

Dipihak lain perbanditan sosial dapat di jelaskan kaitannya dengan perubahan pola kejahatan berhubungan dengan bentuk ekonomi politik dan artikulasi kedalam ekonomi dunia. Selanjutnya protes dan resistensi lebih mengacu pada ketidakpuasan petani yang didukung oleh tindakan untuk mendapatkan hak-haknya. Protes dan resistensi ini adalah tingkat awal dari pemberontakan. Pada tingkat ini petani sudah sadar dan terkait dengan golongan penguasa atau pemerintah kolonial. Perbanditan sosial dapat dikategorikan sebagai oposisi atau perlawanan.

PRAKTIK APANAGE DAN BEKEL MEMICU KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS DI JAWA

Sistem apanage dan bekel yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Jawa merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan peningkatan kriminalitas di kalangan masyarakat Jawa. Praktik ini merupakan bagian dari kebijakan agraria kolonial yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di wilayah jajahan demi kepentingan ekonomi Belanda.

Apanage merujuk pada pemberian hak kepemilikan tanah oleh pemerintah kolonial kepada para bangsawan Jawa sebagai imbalan atas jasa mereka. Namun, dalam praktiknya, para bangsawan seringkali menyalahgunakan kekuasaan ini dengan memungut pajak yang sangat tinggi dari rakyat jelata yang menggarap tanah tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara para bangsawan dengan rakyat desa.

Di sisi lain, bekel merupakan pejabat desa yang bertugas mengatur dan mengendalikan tenaga kerja di tanah apanage. Mereka memiliki kekuasaan untuk memaksa rakyat desa bekerja di perkebunan-perkebunan milik kolonial dengan upah yang sangat rendah atau bahkan tanpa upah sama sekali. Kondisi ini menyebabkan rakyat desa hidup dalam kemiskinan dan penindasan yang berkepanjangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Apanage dan Bekel" karya Suhartono, praktik apanage dan bekel ini mengakibatkan semakin meluasnya kemiskinan di kalangan rakyat Jawa. Mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang kerja yang layak, sehingga terpaksa mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan.

Kondisi penindasan dan kemiskinan yang dihadapi rakyat Jawa memicu munculnya gerakan perlawanan yang dikenal sebagai banditisme atau perbanditan sosial. Para bandit ini seringkali berasal dari kalangan rakyat jelata yang merasa tertindas secara ekonomi dan sosial oleh praktik apanage dan bekel. Mereka melakukan tindakan kriminal seperti perampokan dan pencurian sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan para bangsawan yang dianggap menindas. Kondisi penindasan dan kemiskinan yang dihadapi rakyat Jawa memicu munculnya gerakan perlawanan yang dikenal sebagai banditisme atau perbanditan sosial. Para bandit ini seringkali berasal dari kalangan rakyat jelata yang merasa tertindas secara ekonomi dan sosial oleh praktik apanage dan bekel. Mereka melakukan tindakan kriminal seperti perampokan dan pencurian sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan para bangsawan yang dianggap menindas. Perbanditan sosial di Jawa pada masa kolonial tidak hanya mencerminkan reaksi terhadap kemiskinan dan penindasan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Sikap dasar perbanditan ini menjadi motivasi bagi sebagian masyarakat Jawa untuk terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan, termasuk melalui tindakan kriminal.

Selain itu, praktik apanage dan bekel juga berdampak pada terjadinya perubahan sosial di pedesaan Jawa. Sebagaimana dibahas dalam makalah yang diberikan, masuknya budaya kapitalis melalui perkebunan-perkebunan kolonial mengakibatkan petani kehilangan orientasi dan terpisah dari budaya asli mereka. Hal ini semakin memperparah

kondisi kemiskinan dan mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi yang dihadapi.

LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI YANG MENDORONG MUNCULNYA BANDITISME

Banditisme sering kali muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong munculnya banditisme yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi, dapat menjadi penyebab individu mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti melalui kegiatan kriminal seperti banditisme. Ada juga pengaruh status sosial ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan kriminal seperti banditisme. Misalnya, individu dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar karena mereka memiliki kesempatan yang terbatas untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka melalui cara-cara legal.

Faktor eksternal seperti keamanan pedesaan yang tidak stabil dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan kriminal seperti banditisme. Misalnya, keadaan pedesaan yang tidak aman dapat memungkinkan individu untuk melakukan kegiatan kriminal dengan lebih mudah dan aman. Latar belakang sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi motivasi belajar individu. Misalnya, individu dari latar belakang sosial ekonomi tinggi mungkin memiliki motivasi yang lebih kuat untuk belajar dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka, sedangkan individu dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin memiliki motivasi yang lebih rendah untuk belajar dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka.

Pembangunan dan industrialisasi dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Meskipun industri dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pengangguran dan kerusakan lingkungan. Munculnya semangat nasionalisme dan perjuangan untuk hak-hak tertentu juga dapat mendorong munculnya banditisme. Misalnya, perjuangan untuk kemerdekaan atau otonomi sering kali melibatkan tindakan banditisme.

SIKAP DASAR PERBANDITAN DALAM BUDAYA JAWA BERKAITAN DENGAN KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS

Istilah perbanditan dipandang sangat subyektif, dari sudut pandang mana istilah itu diberikan. Biasanya istilah itu muncul dari kalangan penguasa yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Memang perbanditan selalu mengacu pada perbuatan individu atau kelompok yang menentang hukum. Bandit itu mencakup pengertian: a). perampok berkawan; b). seorang yang mencuri, mambunuh dengan cara kejam dan tanpa rasa malu; c). seorang yang mendapatkan keuntungan dengan tidak wajar; d). musuh. Meskipun demikian bandit juga dibedakan menjadi bandit biasa (ordinary bandit) dan bandit sosial (social bandit). Pada umumnya bandit biasa adalah seseorang yang melakukan kejahatan dengan merampok tanpa latar belakang apapun, sedang bandit sosial adalah perbuatan seseorang untuk merampok yang dilatarbelakangi kepentingan sosial-politik.

Gerakan perbanditan itu dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi, khususnya untuk perbanditan pedesaan di Jawa belum mengarah pada gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dilakukan ditempat lain. Pada dasarnya ciri khas banditisme adalah: 1). Tidak meninggalkan komunitasnya; 2). Mencerminkan nilai moral dan ideologi komunitasnya; 3). Perbuatannya yang ganas konsisten dengan ideologinya, korbannya yang dianggap musuh komunitasnya; dan 4). Ia dibantu baik kata maupun perbuatannya oleh masyarakat. Perbanditan mengandung protes sosial yang tidak lepas dari perasaan tidak puas, sukar melepaskan perbanditan yang sesungguhnya dengan gerakan sosial dan gambaran situasi

yang masih primitif. Perbanditan sosial dipandang sebagai pahlawan, jago, seorang yang musuhnya sama dengan musuh petani.

Untuk mencegah para bandit dipedesaan kepala-kepala desa mengalami kesulitan, karena sebenarnya mereka itu ibarat air dan ikan. Dimana seharusnya mereka berpihak. Proses lahirnya perbanditan berasal dari petani yang terdesak dan tertekan oleh beratnya pajak dan kerja wajib. Dalam dunia perbanditan juga mempunyai cara untuk memecahkan penguasa dan korbannya. Meskipun sudah ada aturan untuk melindungi perbanditan tetapi pemerintah harus memperkuat penjagaan dengan kerjasama pemerintah dengan kepala desa.

PERBANDITAN MANIFESTASI, PROTES SOSIAL

Sejak masa kerajaan, kondisi sosio-ekonomi petani tidak pernah berlebihan Hal ini disebabkan oleh kedudukan petani yang rendah yang membawa konsekuensi bermacam-macam. Perbanditan yang timbul di pedesaan tidak dapat dilepaskan dengan hilangnya fungsi tanah. Dari hubungan pemilikan tanah dan kewajiban pajak, petani juga memperoleh pendapatan berupa hasil tanah. Tetapi perolehan petani dikonsumsi kembali dan praktis mereka tidak mempunyai uang kontan lagi.

Pendapatan petani yang ada dibawah subsistensi selalu mengalami penyusutan dan tampak sekali bahwa tidak sesuainya penghasilan dengan kebutuhan hidup. Semakin maju dan luas perkebunan di pedesaan semakin cepat pula perubahan kehidupan petani, dapat dikatakan perkebunan dan pabrik menguasai sektor-sektor keperluan yang hanya dapat dipenuhi oleh petani.

Di dalam proses produksi kapitalis, petani menjadi penyedia tenaga kerja. Satu-satunya milik petani yaitu tenaga kerja dijadikan salah satu factor produksi. Perkebunan dan pabrik hanya dapat berjalan jika upah kerja ditekan, dan keuntungan jadi berlipat ganda jika upah kerja itu ditekan seminimum mungkin. Kedudukan petani dan buruh sangat lemah, mereka tidak berdaya menghadapi penguasa-penguasa. Demikianlah nasib petani, secara structural kedudukan petani ada di bawah yang mau tidak mau dikuasai struktur atas. Reaksi yang dilancarkan petani sebanding dengan tekanan yang diterimanya, semakin berat tekanan semakin keras pula tekanannya.

Kehidupan ekonomi petani yang selalu ada dibawah, jelas tidak memberi harapan lahirnya kesejahteraan mereka. Perasaan tidak puas yang tidak dapat ditoleransikan sebagai akibat dominasi perkebunan mendorong petani menyiapkan diri akhirnya membulatkan tekad untuk melawan pihak-pihak yang dianggap merugikan petani.

Sejak berlakunya politik ekonomi liberal tahun 1870, kehidupan di pedesaan tidak menjadi makin baik tetapi bahkan sebaliknya. Meskipun dilakukan penghapusan tanam paksa untuk berbagai jenis tanaman, tetapi dampaknya tidak menguntungkan bagi kehidupan petani. Secara tidak disadari pemerintah dan perusahaan perkebunan mulai berjaga-jaga agar perusahaannya selamat. Gerakan mereka yang semula berbasis pada gerakan tradisional, bergeser pada gerakan modern yaitu melalui organisasi politik. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan Pasuruan merupakan awal tempat berpijaknya para calon pemimpin Partai Komunis Indonesia(PKI) dan Partai Nasional Indonesia(PNI).

Biasanya mereka berasal dari daerah pedesaan disekitar perkebunan yang karena kesempatan baru mereka melanjutkan sekolah di kota-kota,di antara mereka tidak jarang berkenalan dengan tokoh-tokoh komunis yang juga menjadi anggota SI setempat. Dari sinilah awal mula penyebaran komunisme yang secara kebetulan mempunyai persamaan dengan tujuan SI yang akan menyejahterakan buruh dan petani.

Partisipasi buruh petani dalam organisasi politik dapat dilihat dari derjat atau tingkat pendidikannya. Pendidikan mereka kebanyakan adalah rendahan dan mereka cenderung menjadi anggota organisasi buruh yang mudah dimanfaatkan dalam setiap gerakan. Petani makin tergantung dan terikat dengan uang sewa yang dibayarkan perkebunan.

JENIS PERBANDITAN PEDESAAN

Perbanditan di pedesaan bermacam-macam jenisnya, pada dasarnya perbanditan timbul sebagai akibat perubahan sosial yang diintroduksikan pemerintah colonial melalui tanah-tanah partikelir maupun tanah perkebunan. Reaksi yang muncul dari petani karena tekanan pajak dan kerja wajib yang berat mengakibatkan kemiskinan, penghisapan, dan penekanan. Masuknya kultur barat ke pedesaan menyebabkan juga petani kehilangan orientasi dan lepas dari budaya aslinya sehingga, mereka mencari jalan keluar antara lain berupa perbanditan. Di Jawa bandit dapat disamakan dengan durjana, lun, bajingan, dan lain-lain. Dalam laporan kolonial digunakan berbagai istilah bendewezen, roofpartij, roverbende, roverij untuk menyebut bandit. Kecu dan rampok terdiri dari kawan-an yang lebih dari 20 orang, koyok lebih dari 5 orang, dan culeg lebih dari 3 orang.

Maling atau pencuri dan begal, meskipun sering dilakukan lebih dari seorang dapat digolongkan resistensi individu. Yang jelas sasaran mereka individu pula yang merugikan petani. Mereka ini digolongkan kejahatan kecil, sedangkan rampok dan kecu termasuk kejahatan besar atau kejahatan serius. Dalam kacamata pemerintah perbanditan digolongkan menjadi 3, yaitu: a). kriminalitas (criminal bandit), b). perbanditan (banditry) dan c). pemberontakan (rebellion).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari materi kemiskinan dan kriminalitas adalah bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kriminalitas. Studi menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Kemiskinan juga menyebabkan peningkatan tingkat tindak kriminalitas, yang terutama dilakukan oleh anak-anak usia dibawah umur dan remaja. Upaya untuk menanggulangi kriminalitas meliputi hukuman atau sanksi, yang masih menjadi cara paling ampuh.

Untuk memahami sejarah kemiskinan dan kriminalitas terkait dengan apanage dan banditisme adalah dengan melakukan studi mendalam tentang perkembangan ekonomi dan sosial pada periode tersebut. Fokus pada analisis tentang bagaimana sistem apanage mempengaruhi distribusi kekayaan dan keadilan sosial, serta bagaimana banditisme muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan tersebut. Dengan memahami dinamika ini, akan lebih mudah untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kriminalitas dan kemiskinan yang relevan dengan konteks sejarah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksilas Dasfordate, Darmawan Edi Winoto, Aldegonda Evangeline Palealu, Max Laurens Tamon, *"Buku Ajar Sejarah Sosial Ekonomi"*. Eureka Media Aksara, tahun 2023.
- Aris Muzhiat, *"Gerakan Sosial Masyarakat Banten Abad Ke-XIX: Gejala Ekonomi, Politik dan Agama, 1808-1845"*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022.
- Eko Ribawati, M.Pd., Dr. H. Agus Rustamana, M.Pd. *"Sejarah Sosial Ekonomi Kajian Masyarakat Jawa dan Banten"*. Penerbit Media Edukasi Indonesia, tahun 2023.
- Geertz, C. (2013). *"Agama Jawa: Abangan santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa"*. Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (2014). *"Pembrontakan Petani Banten 1888"*. Pustaka Jaya.
- Latif, Y. (2012). *Genealogi intelektual: Pengantar filsafat sains dan penelitian*. Preneda Media.
- Margana, S., (2003), *"The Argarian Dispute dan Social Basis of Colonial Plantation in Javanese principality: Viwes from Javanese Sources"*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18 (2).
- Mohamad Hudaeri, *"Jawara di Banten: Peran Kedudukan dan Jaringannya"*. *Jurnal Al-Qalam* Vol. 20, No. 97, tahun 2003.
- Ryantino Paundra Nagari, *"Bandit-Bandit Pedesaan Jawa"*. Universitas Gadjah Mada, tahun 2015.

Suhartono (1991), *“Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920.”*
Yogyakarta: Tiara Wacana

Suseno, F. M.. (2018). *“Etika Jawa: Sebuah analisis filsafis tentang kebijaksanaan hidup Jawa”.*
Gramedia Pustaka Utama.